

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diubah Untuk Yang Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893];
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953];
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6051, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112];
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950];
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tentang Bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 807];

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR vi ABSTRAK	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Sumber bahan hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II KEDUDUKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK STREAMER NIMO TV	
2.1 Legal Standing Pemerintah Melakukan Pemungutan Pajak Penghasilan Nimo Tv 1.....	5
2.1.1 Urgensi Pemerintah Melakukan Pemungutan PPh Streamer Nimo Tv	16

2.1.2 Yuridiksi Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan	
Streamer Nimo Tv	20
2.1.3 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak	21
2.1.4 Fungsi Pemungutan Pajak.	26
2.2 Pajak Streamer Nimo TV Berdasarkan Undang-Undang Pajak	
Penghasilan	28
2.2.1 Streamer Nimo Tv Sebagai Subjek Penghasilan	28
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan	29

BAB III KEABSAHAN PEMUNGUTAN PAJAK STREAMER

NIMO TV	32
3.1 Keabsahan Pemungutan Pajak Streamer Nimo Tv	32
3.1.1 Sistem Pemungutan Pajak Streamer Nimo TV	32
3.2 Dasar Pemungutan Streamer Nimo Tv.....	37
3.2.1 Penerapan Asas-Asas Pemungutan Pajak Terhadap Streamer	
Nimo Tv	39
3.2.2 Kewenangan Memungut Dalam Pemungutan Pajak Streamer	
Nimo Tv	43

BAB IVPENUTUP

4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR BACAAN